

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Studi Penyebab Deviasi Kontrak Pada Paket Pekerjaan Konstruksi Berbasis Temuan Audit Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Deviasi pelaksanaan kontrak pada proyek konstruksi meliputi deviasi terhadap Biaya (Cost), deviasi terhadap Kualitas (Quality) dan deviasi terhadap Waktu (Time) yang telah disepakati disetiap kontrak pada proyek konstruksi.
2. Studi ini menemukan penyebab deviasi pelaksanaan kontrak pada proyek konstruksi adalah:
  - a. PPK, PPTK, Kontraktor dan Konsultan tidak melakukan pengukuran bersama terhadap item pekerjaan yang akan menimbulkan Biaya (Cost) yang akan dibayarkan
  - b. Kontraktor dan Konsultan Pengawas tidak menyampaikan bobot yang sesuai dengan kondisi riil dilapangan pada laporan kemajuan pekerjaan
  - c. PPK tidak memberikan kontrak sebagai acuan pengawasan kepada Konsultan Pengawas
  - d. Kontraktor tidak memahami tata cara penyusunan RPKM
  - e. PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu untuk keseluruhan item pekerjaan
  - f. PPK dan PPTK tidak mendetailkan lokasi pekerjaan pada saat penyerahan lapangan
  - g. PPK dan PPTK tidak melaksanakan penanganan keterlambatan dan kontrak kritis (SCM) sesuai prosedur
3. Pemilik proyek (PPK dan PPTK) merupakan penyumbang (kontributor) terbesar atas penyebab deviasi pelaksanaan kontrak pada proyek konstruksi dengan porsi 58,33%.

4. Studi ini menemukan bahwa terdapat 3 (tiga) langkah-langkah mitigasi yang efektif dalam pengendalian proyek pembangunan, yaitu:
  - a. Diperlukan suatu program penjaminan mutu yang sistematis, lengkap dan jelas.
  - b. Diperlukan suatu komitmen yang lebih tinggi lagi dari pihak pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - c. Wajib dilakukan evaluasi tentang mekanisme pembayaran terhadap kontraktor maupun konsultan pengawas.

## 5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat atau peneliti lain adalah sebagai berikut:

1. Informan/Pakar memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan proyek yang berbeda-beda, sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif diperlukan jumlah Informan/Pakar yang lebih banyak dengan Putaran (Round) wawancara yang lebih banyak.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan suatu kebijakan yang mengatur:
  - a. Tata cara penyusunan program penjaminan mutu sistematis, lengkap dan jelas.
  - b. Peningkatan kapasitas pelaksana proyek konstruksi (PPK dan PPTK) dibidang manajemen kontrak proyek konstruksi.